

# **ANALISIS PENGUKURAN TINGKAT KESESUAIN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Agustina Suparyti Nurhayati

*Universitas Trisakti*

Email : agustina.suparyati@yahoo.com nur.usakti@yahoo.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian dengan menggunakan variabel komunikasi kemampuan organisasi, pengawasan dan modal sosial dan menganalisa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisa matriks kepentingan-kinerja, analisa tingkat kesesuaian dan prioritas serta analisis SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisa matrik kepentingan-kinerja, indikator yang dianggap harus di prioritaskan (harapan tinggi namun kinerja rendah) dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah adanya kesempatan masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja baru, kecepatan aparatur, gotong royong masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dari analisa tingkat kesesuaian dan prioritas didapatkan hasil indikator yang memiliki tingkat kesesuaian diatas 80% adalah indikator prasarana dan prasarana yang dibangun bermamfaat, indikator adanya gotong royong, indikator peran tokoh agama dan indikator peran tokoh masyarakat dalam implementasi kebijakan. Analisis SEM menghasilkan kesimpulan bahwa dari keempat variabel yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, terdapat dua variabel yaitu komunikasi dan kemampuan organisasi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik.

**Kata kunci** : kemiskinan, implementasi kebijakan, kesesuaian, prioritas

## PENDAHULUAN

Kemiskinan menggambarkan suatu keadaan belum mempunyai seseorang (*individu*) untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (*human basic needs*) bagi kelangsungan hidupnya secara wajar. Konsep kemiskinan mencakup problema yang multi kompleks dan dapat dilihat dari berbagai segi, misalnya selain ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, juga ditengari oleh keterbatasan kebutuhan yang menyangkut fungsi sosial. Friedman (1979) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi terbatasnya kesempatan kerja untuk mengakumulasi modal yang produktif seperti: tanah, perumahan dan peralatan lainnya, terbatasnya jaringan sosial seperti dalam memperoleh kesempatan kerja, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, hubungan dan informasi, kesemuanya itu diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi manusia.

Persoalan kemiskinan lebih luas dari sekadar berapa banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada dimensi lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu kedalaman dari kemiskinan. Dimensi kedalaman menggambarkan seberapa kecil kemampuan yang dimiliki penduduk miskin untuk memenuhi taraf hidup minimal, dan seberapa jauh perbaikan dalam ekonomi mampu meningkatkan taraf hidup tersebut.

Ini akan menentukan bentuk dan desain kebijakan pengentasan kemiskinan yang harus diambil. Kebijakan kemiskinan harus mampu memperkecil jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dari kemiskinan yang masih tersisa.

Indikator keberhasilan kebijakan tidak bisa hanya didasarkan semata-mata penurunan rasio penduduk miskin terhadap populasi, yang dikenal dengan rasio *headcount poverty* (HCP). Jika tujuan kebijakan terlalu menekankan pada penurunan rasio HCP, suatu kebijakan akan dianggap berhasil meskipun penurunan angka kemiskinan hanya terjadi pada kategori *transient poor* tanpa menyelesaikan masalah *chronic poor*. Lebih buruk lagi, bisa saja angka *chronic poor* meningkat, tapi karena secara total angka kemiskinan menurun, kebijakan tetap dianggap berhasil. Yang diperlukan ke depan adalah desain kebijakan pengentasan kemiskinan yang komprehensif. Ikhsan (2001) menyebutkan lima pilar yang diperlukan dalam desain kebijakan, yaitu redistribusi melalui pertumbuhan, pembenahan kelembagaan, perlindungan sosial, partisipasi publik serta perhatian pada perempuan dan anak-anak.

Dalam rangka untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden. Sebagai suatu

langkah kinerja dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan, TNP2K berupaya mengembangkan paradigma dalam proses penanganan penanggulangan kemiskinan yang sifatnya sektoral, guna mengarah pada pola penanganan yang bersifat multisektoral.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan secara umum masih terdapat banyak kelemahan dari kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut. Setidaknya ada lima kelemahan dalam penerapan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. **Pertama**, kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara seragam (general) tanpa melihat konteks sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah (komunitas). **Kedua**, definisi dan pengukuran kemiskinan lebih banyak di pengaruhi pihak luar (*externally imposed*) dan memakai parameter yang terlalu ekonomis. Implikasinya adalah konsep penanganan kemiskinan mengalami bias sasaran dan mereduksi dari hakikat kemiskinan itu sendiri. **Ketiga**, penanganan program pengentasan kemiskinan mengalami birokratisasi yang dalam, sehingga banyak yang gagal akibat belitan prosedur yang terlampau panjang. **Keempat**, kebijakan penanganan kemiskinan sering ditumpangi oleh kepentingan politik yang amat kental sehingga tidak mempunyai muatan atau makna dalam penguatan perekonomian

masyarakat miskin. **Kelima**, kebijakan kemiskinan kurang mempertimbangan aspek ekonomi kelembagaan sebagai prinsip yang dikedepankan sehingga sebagian kebijakan itu tidak berhasil karena program yang dirancang dalam pengentasan kemiskinan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat miskin

Melihat kondisi diatas maka perlu adanya penanganan kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu melihat kemiskinan tidak hanya melihat dari sisi pendapatan yang diterima perkapita, namun perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan letak geografis suatu daerah. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum, namun kebijakan tersebut harus dirancang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di daerah tertentu.

DKI Jakarta sebagai kota metropolitan juga tidak lepas dari kemiskinan. Angka kemiskinan DKI Jakarta 2011 sebesar 3,75 % dan pada tahun 2012 turun menjadi 3,70%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta paling tinggi terdapat di Kota Jakarta Utara sebanyak 847.000 jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 5.07% sedangkan terendah adalah di Kabupaten Kepulauan Seribu yang hanya sekitar 25.000 jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 11,53%. Sementara itu garis kemiskinan tertinggi adalah Kota Jakarta Selatan sebesar Rp 430.345/kapita/bulan dan garis kemiskinan

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan**

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (000)</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)</b>
Kepulauan Seribu	2.5	393,717
Jakarta Selatan	71.8	430,345
Jakarta Timur	83.8	352,614
Jakarta Pusat	32.6	370,897
Jakarta Barat	79.7	347,449
Jakarta Utara	<b>84.7</b>	<b>344,089</b>
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>363,42</b>	<b>355,480</b>

**Sumber : BPS, 2011**

terrendah adalah di Kota Jakarta Utara sebesar Rp 344,089/kapita/bulan yang sedikit berada dibawah rata-rata garis kemiskinan di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 355,480/kapita/bulan.

Saat ini berbagai program penanggulangan kemiskinan telah digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari program yang berbasiskan bantuan langsung kepada masyarakat, usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat sampai upaya menjaring peran serta masyarakat / swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keseluruhan program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggungan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaanya, koordinasi pencapaian program-program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh kelompok program (klaster) yang terdiri dari 4 klaster, yaitu : **klaster 1**, yaitu klaster

Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; **klaster 2**, yaitu klaster Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan; **klaster 3**, yaitu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; serta **Klaster 4**, yaitu klaster pendukung.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara terus menerus mengkaji dan melakukan penyempurnaan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Tapi apakah kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan ini benar-benar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya dan apakah semua kebijakan tersebut benar - benar berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk dan instruksi pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan?

Oleh sebab itu perlu suatu kajian untuk mengukur tingkat kesesuaian antara implementasi kebijakan penprov DKI yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan persepsi masyarakat sebagai objek kebijakan tersebut. Dengan kajian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Penprov DKI sehingga masyarakat akan mendapat pelayanan yang lebih baik, sehingga angka kemiskinan DKI Jakarta dapat diturunkan dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta akan meningkat.

Berdasarkan data kemiskinan di DKI Jakarta, telah diuraikan diatas bahwa Angka di kemiskinan dan garis kemiskinan terendah di DKI Jakarta adalah di Kota Jakarta, sehingga kajian wilayah penelitian urgensi di Kota Jakarta Utara.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mengukur tingkat kesesuaian antara implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan persepsi masyarakat serta mengetahui bagaimana variabel komunikasi, kemampuan organisasi, pengawasan dan modal sosial dalam mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Jakarta Utara?

### **Kajian Teori**

#### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Cari Friedrich (dalam Wahab, 2001,3),

mendefinisikan sebagai berikut: “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan - hambatan tertentu seraya mencari peluang - peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan”.

Kebijakan yang diambil menjadi tidak mempunyai arti jika tanpa unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dapat dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai „*the authoritative allocation of values for the whole society*” (dikutip dari Islamy, 2001; 19), bahwa kebijakan tersebut mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan kepada masyarakat.

Mengacu pada pendapat para ahli tersebut (William N Dunn, D.C. Korten), maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan di sini adalah kebijakan atau keputusan publik yang selalu berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edwards III (dalam Budi Winarno, 1998; 18) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

**Variable komunikasi** yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya;

**Variable Struktur Birokrasi** mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan;

**Variable sumber-sumber** yang dimaksud disini adalah sumber daya yang mencakup manusia termasuk modal sosial yang dimiliki masyarakat setempat, informasi dan sarana – prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;

**Variable kecenderungan** - **kecenderungan** atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana, bisa berupa sikap positif dalam bentuk memberikan dukungan atau sikap negatif dalam bentuk apatis.

### **Konsep Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan**

#### **Program - Program Penanggulangan Kemiskinan**

Program penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini merupakan program-program yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, koordinasi pencapaian program-program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh kelompok program (klaster) yang terdiri dari 4 klaster, yaitu : (1). klaster 1, yaitu klaster Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; (2). klaster 2, yaitu klaster Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan; (3). klaster 3, yaitu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; serta (4). Klaster 4, yaitu klaster pendukung.

Adapun program-program unggulan Pemprov DKI Jakarta di bidang penanggulangan kemiskinan, antara lain : Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN); KB Gratis bagi Keluarga Miskin; Bantuan Biaya Pemakaman bagi Keluarga Miskin; Pemberian Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) bagi siswa miskin; Penataan RW Kumuh; Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) bagi usaha mikro dan kecil; Pelatihan Keterampilan dan pembentukan kelompok Wira Usaha Baru (WUB) bagi para pencari kerja dan penganggur; Program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui PPMK ( Program

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Seluruh program penanggulangan kemiskinan ini merupakan bagian utama dari upaya jangka menengah dan jangka panjang pemerintah dalam menanggapi desentralisasi dan pemerintah daerah di Indonesia.

### **Komunikasi**

Komunikasi berperan dan berpengaruh terhadap kegiatan organisasi, dengan komunikasi yang efektif maka tujuan organisasi akan dapat dicapai secara maksimal."Dalam kehidupan organisasi pencapaian tujuan dengan segala proses remifikasinya membutuhkan komunikasi yang efektif (Siagian : 1985 :9)

Dikatakan juga bahwa "Komunikasi adalah pentransferan dan pemahaman makna (Stephen, 2001;31). Komunikasi dapat dipandang sebagai proses pengiriman dan penerimaan lambang-lambang antar pribadi dengan makna-makna yang dikaitkan dengan lambang - lambang tersebut (Ron Ludlow dan Fergus Panton,2000;7).

### **Kemampuan Organisasi**

Dalam kehidupan organisasi, agar organisasi dapat berjalan maka organisasi tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan menjalankannya. Dalam hal ini terutama para penyusun organisasi di dalamnya. Istilah - istilah kemampuan biasanya menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas /

pekerjaan. AS Moenir (1983;76) mendefinisikan bahwa, kemampuan dalam bubungan dengan pekerjaan ialah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga, menghasilkan sesuatu yang optimal.

Pendapat Ken Blanchard (dalam Agus Dharma, 1986:87), menyebutkan bahwa kematangan pekerjaan dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu, hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan pengetahuan dan ketrampilan dijelaskan oleh Miftah Toha (1983:316) sebagai "kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan dan pelatihan dan atau pengalaman.

Mencermati berbagai pendapat mengenai kemampuan maka dapat dilihat bahwa kemampuan merupakan sesuatu yang menunjukkan tingkat kematangan yang dimiliki berasal dari pendidikan, ketrampilan ataupun pengalaman yang diperoleh dalam proses pelaksanaan tugas organisasi.

### **Struktur Organisasi**

Pengertian organisasi menurut pendapat James D Money (dalam Sarwoto, 1988:13) adalah " *The form every human association for attainment or common purpose* (bentuk setiap kerjasama manusia, untuk pencapaian tujuan bersama)".

Pendapat lain yang masih senada, dikemukakan oleh Sitanggang (1986: 135) yaitu: "Suatu tuntutan hubungan kerjasama antara, orang - orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengadakan pembagian tugas dan pembatasan tanggung jawab. Suatu organisasi disebut baik bila semua struktural fungsional berjalan dengan baik yakni dapat melakukan tugas hubungan interaksi dengan norma - norma dan nilai - nilai yang dimiliki dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan".

Dengan memahami berbagai pendapat di atas bila di hubungkan antara kemampuan organisasi dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tentunya dapat dikatakan bahwa dengan kemampuan organisasi yang maksimal diberdayakan maka akan diperoleh implementasi kebijakan sesuai dengan harapan secara lebih khusus pada Program Penanggulangan Kemiskinan.

### **Pengawasan**

Pengawasan sering diartikan sebagai suatu kondisi seseorang pemimpin atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya memantau kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Namun pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Henry Fayol (dikutip oleh Ibrahim Lubis 1988:2.5): "dalam setiap usaha pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan

instruksi - instruksi yang telah dikeluarkan prinsip - prinsip yang telah ditetapkan dan Pengawasan bertujuan menunjuk atau menemukan kelemahan - kelemahan itu. Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan memperbaiki jika ada kesalahan atau penyimpangan - penyimpangan.

### **Sumber daya organisasi**

Manajemen sumber daya manusia, adalah suatu upaya untuk mengelola dan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi pemerintah (pelaku program pengembangan kecamatan) sebagai suatu aset dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengelola disini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, seperti pemberian insentif, operasional kegiatan dan *training and development* tetapi sangat kompleks menyangkut perencanaan, rekrutment, kompensasi dan bagaimana, menciptakan manusia pembelajar yang senantiasa, memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam upaya untuk melancarkan pelaksanaan tugasnya.

### **Modal Sosial**

Modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma

dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.

#### **Penetapan Standard**

Tolok ukur ini diperlukan untuk dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan perundangan. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingan tersebut merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyata - nyata dicapai melalui perbandingan terhadap apa yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan.

Selanjutnya tindak lanjut berikutnya perlu dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan pembenahannya setelah mengukur pelaksanaannya dan membandingkan. Langkah tindak lanjut ini dapat berupa : penyesuaian mengenai rencananya dan atau kebijaksanaannya dan atau ketentuan - ketentuannya, memberikan bimbingan, penghargaan dan sanksi.

#### **Hipotesa**

Hipotesa yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah :

- H<sub>1</sub>: Ada pengaruh variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan
- H<sub>2</sub>: Ada pengaruh variabel kemampuan organisasi terhadap Implementasi kebijakan penanggulangan
- H<sub>3</sub>: Ada pengaruh variabel pengawasan terhadap implementas kebijakan penanggulangan kemiskinan
- H<sub>4</sub>: Ada pengaruh variabel modal sosial terhadap implementas kebijakan penanggulangan kemiskinan

#### **Metodologi Penelitian**

##### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah provinsi DKI Jakarta, dimana Kota Jakarta Utara dipilih sebagai sampel untuk melihat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta. pengambilan Jakarta Utara sebagai sampel akan dilakukan 3 kecamatan yaitu Penjaringan, Pademangan dan Tanjung Priok. Waktu penelitian dalam penyebaran kuesioner dilakukan selama bulan Juni-Agustus 2014.

##### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini populasinya adalah Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Rukun Warga (RW) di

Kecamatan-kecamatan yang termasuk di golongan daerah kumuh berat. wilayah Kota Jakarta Utara yang termasuk

**Tabel 2**  
**Daftar KK di Kota Jakarta Utara Terkategori Kumuh Berat Tahun 2008**

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RT Kumuh Berat	Jumlah KK
Penjaringan	Penjaringan	7	931
Pademangan	Pademangan Barat	3	366
	Pademangan Timur	9	1.124
	Ancol	4	235
Tanjung Priok	Tanjung Priok	4	370
Koja	-	4	589
Kelapa	-	-	-
Gading	-	-	-

Sumber : BPS, 2008

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah sampel dari populasi sebanyak 1.297 KK yang berada di RW Kumuh Berat adalah :

$$n = \frac{3.615 \cdot (1,96)^2 \cdot 0,5 (1-0,5)}{3.615 \cdot (0,1)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,5 (1-0,5)} \quad n = 92$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh hasil bahwa besarnya sampel dari penelitian ini sebanyak 92 KK dari 3 Kecamatan yang terpilih yang memiliki RW Kumuh Berat

#### Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua

cara, yaitu: Pengumpulan **Data Primer**, dilakukan melalui kuesioner dan survey lapangan. Pengumpulan **Data Sekunder**, dilakukan dengan survei instansi untuk mendapatkan data-data dan telaah dokumen, terdiri dari: 1) Survei instansi, dilakukan kepada BPS, Bappeda, Dinas-Dinas di Instansi Penprov DKI Jakarta 2) Telaah dokumen yang berkaitan dengan kemiskinan.

#### Alat Analisis

##### Analisa Matriks Kepentingan-Kinerja

Dalam penelitian ini menggunakan analisa matriks kepentingan-kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan

kemiskinan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepentingan (Y) dan tingkat kinerja (X) adalah sebagai berikut :

$$Y = \frac{\sum Yi}{n}$$
$$X = \frac{\sum Xi}{n}$$

Nilai rata rata Harapan dan Kinerja tersebut akan dibandingkan dan untuk membandingkan keduanya hanya akan dilihat melalui angka depannya saja (angka dibelakang koma diabaikan) (Kotler (2006)).

Hasil akhir nya adalah nanti akan terbentuk 4 kuadran dimana gambar kuadran menunjukkan bahwa dari seluruh variabel kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yang tersebar pada empat kuadran, yaitu :

**Kuadran A** : Variabel yang terdapat pada kuadran A ini membutuhkan penanganan yang harus diprioritaskan oleh manajemen karena keberadaan variabel tersebut dinilai sangat penting, sedangkan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan.

**Kuadran B** : Variabel-variabel yang terdapat pada kuadran B harus dipertahankan pihak pemerintah karena pada umumnya tingkat pelaksanaannya telah sesuai

dengan kepentingan dan harapan masyarakat sehingga mampu memuaskan masyarakat.

**Kuadran C** : Menurut masyarakat, variabel-variabel tersebut dinilai kurang penting dan pelaksanaannya dilakukan sesuai harapan masyarakat, sehingga manajemen diharapkan tidak terlalu memprioritaskan variabel tersebut.

**Kuadran D** : Variabel yang terdapat pada kuadran D ini dianggap terlalu berlebihan untuk dikembangkan karena pada dasarnya keberadaan variable tersebut tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan pelayanan jasa bagi pemerintah.

#### **Analisa Tingkat Kesesuaian dan Prioritas**

Perhitungan tingkat kesesuaian dilakukan untuk mengetahui urutan prioritas atribut-atribut dari dimensi kualitas yang menjadi prioritas perbaikan yang dinilai kinerja dengan tingkat kepentingan menurut penilaian responden. Perhitungan kesesuaian menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut di atas akan diperoleh urutan prosentase nilai masing-masing atribut.

Prioritas perbaikan dilakukan pada tiap-tiap atribut, mulai dengan nilai terkecil sampai dengan terbesar.

sosial terhadap persepsi keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.

**Analisa Structural Equation Model (SEM)**

SEM merupakan alat analisis yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel yang kompleks. Penggunaan alat analisa SEM adalah untuk melihat bagaimana pengaruh dari persepsi komunikasi. Persepsi kemampuan organisasi, persepsi pengawasan dan persepsi modal

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil survey, maka penjelasan mengenai matriks kepentingan-kinerja terhadap implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Jakarta Utara sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Survey Kepentingan dan Kinerja**

Variabel	Atribut	KEPENTINGAN (Y)		KINERJA (X)		Kuadran
		Skor Total	Skor Rata-rata	Skor Total	Skor Rata-rata	
Implementasi Kebijakan	Y1	435	4.63	363	3.86	II
	Y2	424	4.51	230	2.45	IV
	Y3	430	4.57	180	1.91	I
	Y4	429	4.56	203	2.16	I
Komunikasi	X11	431	4.59	294	3.13	II
	X12	420	4.47	270	2.87	IV
	X13	407	4.33	231	2.46	III
	X14	415	4.41	283	3.01	IV
Kemampuan Organisasi	X21	426	4.53	270	2.87	IV
	X22	415	4.41	179	1.90	III
Pengawasan	X23	455	4.84	234	2.49	I
	X31	424	4.51	234	2.49	II
	X32	420	4.47	229	2.44	IV
Modal Sosial	X33	428	4.55	200	2.13	II
	X41	435	4.63	358	3.81	III
	X42	423	4.50	362	3.85	III
	X43	434	4.62	394	4.19	I
<b>Total</b>		7251	77.14	4514	48.02	
<b>Rata-rata</b>		426.53	4.54	265.53	2.82	

Sumber : Hasil olahan

**Kuadran I** merupakan kuadran yang memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya kinerja pemerintah terhadap atribut ini belum sesuai dengan harapan masyarakat karena tingkat kepuasan masih rendah. Variabel-variabel yang berada di kuadran ini merupakan variabel yang menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk diperbaiki. Ada 4 variabel yang terdapat pada kuadran ini yaitu **Kesempatan masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja baru (Y3), Peningkatan pendapatan masyarakat (Y4), Kecepatan aparatur dalam pemecahan masalah (X23) dan Gotong royong dapat membantu program Pengentasan Kemiskinan (X43).**

Kesempatan kerja dapat ditingkatkan dengan langkah nyata pemerintah untuk membuka proyek-proyek yang bersifat padat karya (*Labor Intensive*) sehingga akan dapat menampung masyarakat yang memiliki *skill* rendah karena tingkat pendidikan yang rendah. Pembukaan lapangan usaha yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat maka akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat dapat mengurangi pengangguran.

Atribut kecepatan aparatur dalam memecahkan masalah misalkan pada saat masyarakat mengalami kesulitan, musibah atau permasalahan sosial ekonomi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga

dipersepsikan penting oleh masyarakat karena kesigapan aparatur akan membantu mereka keluar dari kesulitan yang mereka hadapi menyebabkan masyarakat merasa diayomi (dilindungi) oleh pemerintah. Atribut yang perlu ditingkatkan lagi kinerjanya adalah atribut Gotong royong pada dasarnya merupakan sifat dasar yang dimiliki rakyat Indonesia dalam memecahkan suatu masalah ataupun mewujudkan tujuan tertentu dari sekelompok masyarakat, seperti bergotong royong membantu warga yang sedang mengalami musibah, bergotong royong membersihkan lingkungan, namun sangat disayangkan bahwa sifat ini pada era modern mulai pupus digantikan oleh sifat individualisme untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu baik melalui LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemerintah setempat terus menggalang rasa gotong royong diantara masyarakat karena akan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan secara bersama-sama.

**Kuadran II** merupakan kuadran yang memuat atribut-atribut yang dianggap penting dan pada kenyataannya kinerja pemerintah terhadap atribut ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Variabel-variabel tersebut harus dipertahankan pihak pemerintah karena pada umumnya tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat sehingga mampu memuaskan masyarakat.

Adapun variabel-variabel tersebut antara lain Prasarana dan sarana yang dibangun bermanfaat (Y1), Sosialisasi Program Pengentasan Kemiskinan kepada masyarakat (X11), Ketersediaan aturan pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan (X31) dan Tingkat kesesuaian antara aturan pelaksanaan dengan kondisi riil (X33).

**Pada Kuadran III** menunjukkan variabel-variabel yang menurut persepsi masyarakat kurang penting dan pelaksanaannya dilakukan sesuai harapan masyarakat yang artinya kinerja pemerintah juga tidak baik, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu memprioritaskan variabel tersebut. Meski demikian, bukan berarti pemerintah mengabaikan atau menurunkan standar pelaksanaan variabel tersebut, karena bukan tidak mungkin pada beberapa waktu mendatang, variabel tersebut akan menjadi variabel yang berpengaruh penting. Adapun variabel yang terdapat pada kuadran III antara lain Keikut-sertaan masyarakat dalam menggali merencanakan kebutuhan (Y2), Penggunaan media komunikasi dalam sosialisasi (X13), Pemberian pelatihan dan ketrampilan (X22), Tokoh Masyarakat aktif berpartisipasi dalam sosialisasi program Pengentasan Kemiskinan (X41) dan Tokoh Agama aktif berpartisipasi dalam sosialisasi program Pengentasan Kemiskinan (X42).

Keikut-sertaan masyarakat dalam menggali merencanakan kebutuhan ternyata bagi masyarakat tidak dibutuhkan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin seharusnya memahami benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan, namun apabila dalam perencanaan kebutuhan masyarakat maka akan menghasilkan kebijakan yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Masyarakat ternyata juga tidak membutuhkan media komunikasi dalam sosialisasi karena masyarakat lebih memahami suatu kebijakan dalam bukti nyata melalui sosialisasi bersifat verbal, tanya jawab langsung di lapangan. Pemberian latihan ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat, alasannya bahwa tidak banyak memberikan jalan keluar bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Pelatihan yang pernah dilakukan antara lain mengatasi kebakaran dan musibah banjir yang bagi mereka bukan pelatihan yang meningkatkan ketrampilan yang bermanfaat untuk mendapatkan atau menciptakan lapangan usaha.

Modal sosial yang berupa peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam keikutsertaannya dalam sosialisasi kebijakan pengentasan kemiskinan ternyata bagi masyarakat tidak dibutuhkan dan pada kenyataannya pun kinerjanya tidak memuaskan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berusaha mengikut sertakan tokoh agama

dan masyarakat tersebut dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat secara langsung baik melalui pertemuan di tingkatan RW ataupun pada saat adanya kegiatan yang bersifat religius misalkan di pengajian ataupun kebaktian di gereja. Namun diluar semuanya variabel di kuadran III perlu diperhatikan bahwa masyarakat miskin sudah sampai tahapan individual, tidak percaya, tidak peduli ataupun tidak mau berkompromi dengan pemerintah karena terlalu sibuk dengan perjuangan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Kuadran IV** merupakan kuadran yang memuat atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya kinerja pemerintah terhadap atribut ini justru menunjukkan kinerja yang baik artinya sesuai dengan harapan masyarakat.. Variabel yang terdapat pada kuadran IV ini dianggap terlalu berlebihan untuk dikembangkan karena pada dasarnya keberadaan variable tersebut tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Beberapa variabel yang berada di kuadran ini adalah Kejelasan informasi yang disampaikan (X12), Tingkat respon

masyarakat dalam komunikasi (X14), Pemanfaatan pengelolaan Lembaga/ organisasi dalam masyarakat (X21) dan Kejelasan dan Kemudahan aturan pelaksanaan (X32).

Variabel-variabel yang terdapat di kuadran IV pada dasarnya memiliki kinerja yang sudah baik dari penilaian masyarakat, namun menurut masyarakat bahwa mereka tidak membutuhkan kejelasan informasi yang disampaikan pada saat sosialisasi, bahkan mereka juga menganggap tidak perlu memberikan respon pada saat berkomunikasi dengan aparatur pemerintah dan tidak memperdulikan pada kejelasan dan kemudahan aturan pelaksanaan kegiatan pogram kegiatan pengentasan kemiskinan. Masyarakat juga memiliki persepsi bahwa keberadaan lembaga/organisasi dalam masyarakat kurang memberikan manfaat seperti LKMD, LSM kurang berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan kaum miskin namun justru LSM seringkali merugikan masyarakat dengan meminta biaya tertentu apabila masyarakat membutuhkan informasi atau barang publik yang disediakan oleh pemerintah karena para oknum LSM tersebut menjanjikan pengadaan fasilitas atau barang tertentu dari pemerintah.

**Tabel 4**  
**Tingkat Kesesuaian Kepentingan – Kinerja dan Prioritas Perbaikan**

ATRIBUT		TKI (%)	RANK
X43	Gotong royong masyarakat	90.78	1
X42	Partisipasi tokoh agama	85.58	2
X41	Partisipasi tokoh masyarakat	82.30	3
Y1	Prasarana dan sarana	83.45	4
X11	Sosialisasi program	68.21	5
X14	Respon masyarakat dalam komunikasi	68.19	6
X12	Kejelasan informasi	64.29	7
X21	Pemanfaatan lembaga masyarakat	63.38	8
X13	Penggunaan media komunikasi	56.76	9
X31	Ketersediaan aturan pelaksanaan	55.19	10
X32	Kejelasan dan kemudahan aturan pelaksana	54.52	11
Y2	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan	54.25	12
X23	Kecepatan aparatur	51.43	13
Y4	Peningkatan pendapatan	47.32	14
X33	Tingkat kesesuaian aturan dengan kondisi riil	46.73	15
X22	Pemberian pelatihan	43.13	16
Y3	Kesempatan lapangan pekerjaan	42.31	17
<b>Rata-Rata</b>		<b>62.22</b>	

Berdasarkan analisis matriks kinerja-kepentingan diperoleh variabel-variabel yang menunjukkan persepsi masyarakat mengenai implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Jakarta Utara. Setelah mengetahui variabel-variabel yang memuaskan atau tidak memuaskan masyarakat dari 5 (lima) dimensi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, maka selanjutnya adalah memperhitungkan tingkat kesesuaian yang dilakukan untuk mengetahui urutan prioritas atribut-atribut dari dimensi kualitas yang menjadi prioritas perbaikan yang dinilai berdasarkan

persentase perbandingan nilai kinerja dengan tingkat kepentingan atribut menurut penilaian dari responden.

Dari perhitungan menggunakan rumus tersebut di atas akan diperoleh urutan prosentase nilai masing-masing atribut. Prioritas perbaikan dilakukan pada tiap-tiap atribut, mulai dengan nilai terkecil sampai dengan yang terbesar. Tabel 4 memperlihatkan urutan prioritas perbaikan atribut-atribut dimensi kualitas jasa yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pemberian pelatihan perlu mendapat penanganan sesegera mungkin, karena memiliki tingkat kesesuaian yang paling rendah yaitu sebesar 42.31 persen dan 43.13 persen. Prioritas selanjutnya yang harus dibenahi adalah tingkat kesesuaian aturan dengan kondisi riil menunjukkan tingkat kesesuaian hanya sebesar 46.73 persen, demikian seterusnya diikuti oleh peningkatan pendapatan sebesar 47,32 persen.

Analisis selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan adalah menggunakan metode analisis data *structural equation model* (SEM). Adapun faktor-faktor yang dianggap mempengaruhinya implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan (Y) antara lain komunikasi (X1), kemampuan organisasi

(X2), pengawasan (X3) dan modal sosial (X4).

**Fit Indices:**

**Chi-square = 111,917; CFI = 0,886; NFI = 0,769; RMSEA = 0,098**

Langkah awal dalam metode analisis SEM adalah melakukan uji hipotesa terhadap hubungan antar variabel. Dari hasil tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan GFI dan RMSEA yang digunakan menghasilkan kesimpulan model fit, sehingga hipotesis teori dilanjutkan. Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa hipotesa 1 diterima dimana terdapat pengaruh positif komunikasi terhadap implementasi kebijakan, begitu juga dengan hipotesa 2 didalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif kemampuan organisasi terhadap mplementasi kebijakan. Sedangkan hipotesa 3 dan 4 ditolak dimana tidak terdapat

**Tabel 5**  
**Pengujian Hipotesa**

Hipotesa	Pengaruh	Teori	Estimasi	T - Value	P-Value	
H <sub>1</sub>	Komunikasi	Implementasi Kebijakan	+	0,230	1,652	0,098
H <sub>2</sub>	Kemampuan Organisasi	Implementasi Kebijakan	+	0,627	2,985	0,003
H <sub>3</sub>	Pengawasan	Implementasi Kebijakan	+	0,093	0,669	0,504
H <sub>4</sub>	Modal Sosial	Implementasi Kebijakan	+	-0,011	-0,088	0,930

pengaruh pengawasan dan modal sosial terhadap implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta khususnya kotamadya Jakarta Utara.

Jika dianalisa lebih lanjut, **variabel komunikasi dan kemampuan organisasi** mampu memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena persepsi responden mengenai apa yang mereka rasakan. Peranan komunikasi penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jakarta Utara karena komunikasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu kebijakan, dengan komunikasi yang baik kepentingan pemerintah akan dipahami oleh masyarakat yang mendapatkan kebijakan tersebut.

Menurut Stephen (2001), komunikasi merupakan pentransferan dan pemahaman makna. Komunikasi akan efektif jika mendapat dukungan orang-orang yang terkait dalam organisasi sehingga akan mempengaruhi kualitas komunikasi, artinya jika semakin tinggi dukungan akan meningkatkan kualitas komunikasi sehingga, komunikasi akan berkembang, sebaliknya jika kurang mendapat dukungan maka kualitas komunikasi menjadi rendah dan komunikasi tidak berkembang. Sehingga yang harus terus dipastikan oleh pemerintah adalah apakah komunikasi dapat diterima atau tidak, dapat diterima jika komunikasi dapat umpan balik yaitu masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya.

Faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam mengkomunikasikan suatu kebijakan adalah dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut harus jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi, dimana banyak terjadi ketidaksamaan (*inconsistent*) terhadap tujuan kebijakan hanya karena sumber informasi tidak menyampaikan dengan komunikasi yang baik, jelas dan tidak bias.

Hasil penelitian menunjukkan variabel kemampuan organisasi signifikannya yaitu mempengaruhi implementasi kebijakan. Kemampuan organisasi disini adalah potensi pelaksana lapangan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat. Semakin terampil dan semakin banyak pengetahuan suatu organisasi yang ditunjuk maka keberhasilan implementasi juga akan besar. Komponen ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para pelaksana dilapangan. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksana kebijakan.

## Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian serta menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Jakarta Utara ini dengan harapan masyarakat berdasarkan persepsi dari 93 responden di 3 Kecamatan yang terpilih yaitu kecamatan Penjaringan, Pademangan dan Tanjung Priuk. Untuk mencapai tujuan diatas maka dalam penelitian ini menggunakan 3 analisis yaitu Analisis Tingkat Kesesuaian, Analisis Kepentingan-Kinerja (*Importance-Performance Analysis Diagram*) dan analisis faktor yang mempengaruhi implementasi penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Analisa tingkat kesesuaian dan prioritas didapatkan hasil indikator yang memiliki tingkat kesesuaian diatas 80% adalah indikator prasarana dan prasarana yang dibangun bermamfaat, indikator adanya gotong royong, indikator peran tokoh agama dan indikator peran tokoh masyarakat dalam implementasi kebijakan.
2. Hasil penelitian menunjukkan dari analisa matrik kepentingan-kinerja, indikator yang dianggap harus di prioritaskan dalam implementasi

kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah Kesempatan masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja baru, Peningkatan pendapatan masyarakat, Kecepatan aparatur dalam pemecahan masalah dan Gotong royong dapat membantu program Pengentasan Kemiskinan

3. Analisis SEM menghasilkan kesimpulan bahwa dari keempat variabel yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, hanya terdapat dua variabel yaitu komunikasi dan kemampuan organisasi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik.

## Implementasi Kebijakan

1. Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan di Jakarta Utara khususnya di 3 kecamatan terpilih yaitu kecamatan pademangan, kecamatan Ancol dan Kecamatan Tanjung Priuk dilaksanakan cukup baik, namun masih perlu senantiasa dilakukan perbaikan - perbaikan pada komunikasi, kemampuan organisasi pengelola , pengawasan serta meningkatkan peran dari modal sosial yang dimiliki masyarakat agar program-program yang implementasikan di 3 kecamatan tersebut dapat berjalan lebih baik dan tetap lestari.

2. Perbaikan komunikasi dapat dilakukan dengan cara sosialisasi secara intensif pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dari tingkat Rukun Warga (RW) sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT), baik kegiatan fisik maupun ekonomi produktif sehingga Program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik.
3. Perlu peningkatan kemampuan organisasi pengelola Program pengentasan kemiskinan dengan cara pemberian motivasi berupa prioritas mendapatkan program kepada Kepala Desa agar lebih memberikan tauladan kepada masyarakat secara nyata
4. Perlu peningkatan pengawasan dengan cara monitoring program kegiatan secara periodik serta lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pengelola yang melanggar aturan, hal ini dapat dilakukan oleh pengelola ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan dan yang terpenting sesuai dengan aturan yang berlaku untuk transportasi yang tegas.

## DAFTAR PUSATAKA

- BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan (2011). "LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2011". BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan (2011). "Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan". BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Biro Kesejahteraan Sosial Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Penelitian SMERU (2011). "Monitoring Rumah Tangga Sasaran/RTS Penerima Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat/Penanggulangan Kemiskinan: Persepsi RTS Terhadap Pelaksanaan dan Manfaat Program, Studi Kasus di 3 Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta". Biro Kesejahteraan Sosial Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Penelitian SMERU.

Analisis Pengukuran Tingkat Kesesuaian Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Dki Jakarta

- Burhanuddin (2007). “Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Dharmasraya: Identifikasi Potensi Wilayah Dan Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan Dan Pusat Pelayanan”. Tesis, Universitas Andalas, Padang.
- Hestuadiputri, Dita (2007). “Peran Dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang”. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (2010). Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)(2012). Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
- Kurniady, Dendy (2009). Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Renggapratiwi, Amelia (2009). “Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan”. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rachman, Hamzah F (2010). “Pola Spasial Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sangadji, E.M. dan Sopiah (2010). “Metode Penelitian: Pendekatan Praktis

dalam Penelitian”. Penerbit Andi,  
Yogyakarta.

Sintadewi, Dian (2008). “Penyebab  
Kemacetan Dana Bergulir Program  
Pengentasan Kemiskinan di  
Perkotaan (P2KP) di Badan  
Keswadayaan

Masyarakat (BKM) Kelurahan Gisikdrono  
Palembang Barat”. Srikpsi,  
Universitas Diponegoro,  
Semarang. N Dunn, William, 2000  
*Pengantar Analisis Kebijakan  
Publik*, edisi kedua, Gajah Mada  
University,.